



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-...

Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang...

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 10);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 68);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 Nomor 62);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Kepala DPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
8. Kepala Desa adalah unsur Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat, lembaga teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS

Ketenagakerjaan...

Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Alokasi/Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBHPD dan RD adalah dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa.

17. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa untuk pengelolaan keuangan pada Bank yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD melalui Peraturan Desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengalokasian dan penggunaan DBHPD dan RD kepada Desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui Program BPJS ketenagakerjaan;
 - b. memberikan tambahan operasional Pemerintahan Desa dan/atau Pemeliharaan atau Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

Bagian...

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 3

- (1) Pengalokasian DBHPD dan RD berasaskan :
 - a. pemerataan, yakni besaran bagian pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa; dan
 - b. keadilan, yakni besaran bagian pajak dan retribusi daerah secara proporsional.
- (2) Asas Pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran bagian hasil pajak dan retribusi daerah yang proporsional untuk setiap Desa.

BAB II
LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 4

- (1) DBHPD dan RD dialokasikan kepada 462 (empat ratus enam puluh dua) Desa di 27 (dua puluh tujuh) kecamatan.
- (2) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya.
- (3) Alokasi DBHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 pada rekening 5.4.01.01.03.0001 sebesar Rp16.909.875.600,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Alokasi RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 pada rekening 5.4.01.02.01.0001 sebesar Rp2.343.538.700,00 (dua milyar tiga ratus empat

puluh...

puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- (5) Pengalokasian DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam APBDes.
- (3) Penetapan besaran alokasi DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada Pemerintah Desa melalui Kecamatan.

BAB III

PENGUNAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penggunaan DBHPD dan RD untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Lamongan meliputi :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM); dan
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT).

- (2) DBHPD dan RD setelah digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk penambahan operasional Pemerintah Desa dan/atau pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebesar Rp176.487,00 (seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) per orang per bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan untuk Iuran bulan Januari sampai dengan Desember 2024 pada tribulan I, tribulan II, tribulan III dan tribulan IV.

Pasal 8

- (1) Penghitungan Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didasarkan pada upah minimum Kabupaten Tahun 2024 sebesar Rp2.828.323,00 (dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan 3 (tiga) fungsi sebagai berikut :

Besaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan

NO	PROGRAM	PERSENTASE		IURAN PER PROGRAM		TOTAL IURAN YANG DIBAYARKAN
		PEMBERI KERJA	TENAGA KERJA	PEMBERI KERJA	TENAGA KERJA	
1	Jaminan Kecelakaan Kerja			6.788,00		6.788,00
2	Jaminan Kematian			8.484,00		8.485,00
3	Jaminan Hari Tua			161.214,00		161.214,00
JUMLAH				176.487,00		176.487,00

Bagian...

Bagian Ketiga

Tambahan Operasional Pemerintah Desa dan/atau untuk Pemeliharaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Rincian penggunaan sisa DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipergunakan antara lain untuk :
 - a. tambahan operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - b. kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
 - c. kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - d. pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasana Pemerintah Desa;
 - e. lain-lain sesuai hasil musyawarah desa.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengelolaan DBHPD dan RD kepada Desa merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan sebagai berikut:
 - a. penggunaan DBHPD dan RD dibahas dalam Musyawarah Desa dan dituangkan dalam APBDes;
 - b. kegiatan DBHPD dan RD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan; dan

c. seluruh...

- c. seluruh pelaksanaan DBHPD dan RD harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

Pasal 11

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan pengelolaan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan membentuk:

- a. tim pembina;
- b. tim pengendali;
- c. pelaksana kegiatan anggaran; dan
- d. tim pengawas kegiatan.

Bagian Kedua

Tim Pembina

Pasal 12

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dibentuk pada tingkat Daerah yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait dan diketuai oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan DBHPD dan RD;
 - b. menentukan besarnya DBHPD dan RD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan kepada Bupati berdasarkan rekapitulasi laporan dari Tim Pengendali.
- (3) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Kegiatan

Pasal 13

- (1) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dibentuk pada tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab : Camat;
 - b. koordinator : Sekretaris Camat;
 - c. ketua : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
 - d. anggota : Staf/petugas teknis kecamatan.
- (2) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengadakan sosialisasi pelaksanaan DBHPD dan RD diwilayahnya;
 - b. melakukan bimbingan teknis operasional dan penelitian dan perencanaan dan pelaksanaan DBHPD dan RD;
 - c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan DBHPD dan RD;
 - e. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. melaksanakan verifikasi usulan kegiatan dan anggaran;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Camat; dan
 - h. melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan DBHPD dan RD kepada Bupati.
- (3) Tim pengendali kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keempat
Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 14

- (1) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dibentuk oleh Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab : Kepala Desa;
 - b. koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. ketua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan DBHPD dan RD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan DBHPD dan RD;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DBHPD dan RD kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 15

- (1) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh masyarakat.

(3) Tim...

- (3) Tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB V TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan DBHPD dan RD kepada Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rekening Kas Desa.

Pasal 17

- (1) Penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dalam 4 (empat) tribulan :
 - a. tribulan I pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan bulan Januari s/d bulan Maret 2024;
 - b. tribulan II untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan April s/d Juni 2024;
 - c. tribulan III untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan Juli s/d September 2024;

d. tribulan...

- d. tribulan IV untuk pembayaran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan Oktober s/d Desember 2024 dan untuk pembayaran tambahan operasional Pemerintah Desa dan/atau untuk pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa.
- (2) Pengajuan DBHPD dan RD dilakukan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes atau Perubahan APBDes.
- (3) Pengajuan Permohonan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (4) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran DBHPD dan RD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 18

- (1) Camat mengajukan permohonan penyaluran DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan dilampiri:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 dan/atau Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024;
 - b. daftar rekapitulasi Iuran Jaminan Sosial Program BPJS Ketenagakerjaan Desa;
 - c. daftar rekapitulasi nomor RKD dan besaran DBHPD dan RD yang diajukan;
 - d. fotokopi buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk Bupati;
 - e. kwitansi tanda terima DBHPD dan RD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;

f. fotokopi...

- f. fotokopi Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian DBHPD dan RD tahun 2024;
 - g. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DBHPD dan RD.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f disampaikan kepada Kepala DPMD, dan huruf g disimpan di Kecamatan.
- (3) Berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 3 (tiga) berkas disampaikan kepada Kepala BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD dan 1 (satu) berkas untuk arsip Kecamatan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyaluran Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Pengajuan DPHPD dan RD oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Camat mengajukan surat permohonan penyaluran DPHPD dan RD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan dilampiri :
- a. daftar rekapitulasi nomor RKD dan besaran DBHPD dan RD yang diajukan;
 - b. fotokopi buku RKD yang ditunjuk oleh Bupati;
 - c. kwitansi tanda terima DBHPD dan RD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;
 - d. berita acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran DPHPD dan RD.
- (2) Berkas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan ketentuan 3 (tiga) berkas disampaikan kepada Kepala BPKAD, 1 (satu) berkas untuk DPMD, dan 1 (satu) berkas untuk arsip Kecamatan.

BAB VI TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 20

Pencairan DBHPD dan RD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 21

- (1) Ketua Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Desa dilengkapi dengan:
 - a. pernyataan surat tanggungjawab belanja mutlak (SPTJBM); dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (3) Dalam pengajuan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.
- (5) Kaur Keuangan sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya...

dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

BAB VII

EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaksanakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan DBHPD dan RD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah adanya proses pencairan tribulan I, tribulan II, tribulan III, dan tribulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada camat melalui Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan DBHPD dan RD.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya kegiatan Penambahan operasional Pemerintah Desa dan/atau Pemeliharaan atau Pembangunan prasarana dan sarana Pemerintah Desa meliputi :

a. penggunaan...

- a. penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan/atau gambar;
- b. realisasi penggunaan DBHPD dan RD;
- c. penatausahaan keuangan DBHPD dan RD
- d. waktu penyelesaian kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan; dan
- e. penyampaian laporan penggunaan DBHPD dan RD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pengalokasian dan penyaluran DBHPD dan RD kepada Desa dilakukan sebagai berikut:

- a. pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan melekat dilaksanakan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan dari tingkat Daerah, Kecamatan dan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat berupa saran serta laporan yang bersifat membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

The image shows a circular official stamp of the Secretary of the Lamongan Regency (Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan). Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'M. RO'IS' and the NIP number '19710615 200312 1 007' are printed.

M. RO'IS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

ALOKASI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH (Rp)
1.	2	3	4
1.	Sukorame	1. Sembung	27.369.800,00
		2. Bangle	29.826.900,00
		3. Kedungkumpul	44.532.100,00
		4. Sukorame	47.725.700,00
		5. Mragel	29.517.100,00
		6. Kedungrejo	26.670.100,00
		7. Sewor	32.105.400,00
		8. Wedoro	31.684.600,00
		9. Pendowokumpul	32.733.400,00
2.	Bluluk	1. Talunrejo	33.075.900,00
		2. Banjargondang	30.907.500,00
		3. Bluluk	40.267.400,00
		4. Cangkring	32.705.700,00
		5. Bronjong	31.702.700,00
		6. Songowareng	37.943.800,00
		7. Kuwurejo	36.048.300,00
		8. Sumberbanjar	37.799.400,00
		9. Primpen	31.960.300,00
3.	Modo	1. Jegreg	43.615.100,00
		2. Kedungpengaron	33.362.200,00
		3. Sumberagung	36.562.900,00
		4. Kedunglerep	30.722.300,00
		5. Jatipayak	35.811.800,00
		6. Kedungwaras	34.364.800,00
		7. Sidomulyo	33.258.900,00
		8. Sambangrejo	27.826.200,00
		9. Medalem	29.481.300,00
		10. Sidodowo	42.091.800,00
		11. Mojorejo	47.442.700,00
		12. Sambongrejo	28.608.100,00
		13. Kedungrejo	34.713.500,00
		14. Kacangan	39.806.100,00
		15. Nguwok	54.939.500,00
		16. Pule	39.147.600,00
		17. Yungyang	34.923.100,00

1.	2	3	4
4.	Ngimbang	1. Kedungmentawar	29.013.000,00
		2. Cerme	28.512.400,00
		3. Gebangangkrik	30.470.900,00
		4. Ngasemlemahbang	30.340.700,00
		5. Slaharwotan	41.964.400,00
		6. Ganggangtingan	32.757.800,00
		7. Jejel	29.371.100,00
		8. Purwokerto	32.789.700,00
		9. Kakatpenjalin	33.882.600,00
		10. Tlemang	27.590.800,00
		11. Mendogo	33.529.400,00
		12. Lawak	41.274.000,00
		13. Drujugurit	27.367.400,00
		14. Girik	31.067.800,00
		15. Munungrejo	39.026.500,00
		16. Ngimbang	28.491.200,00
		17. Durikedungjero	30.688.100,00
		18. Lamongrejo	104.868.500,00
		19. Sendangrejo	47.400.000,00
5.	Babat	1. Karangkembang	38.171.300,00
		2. Pucakwangi	31.515.600,00
		3. Sogo	29.342.200,00
		4. Bedahan	35.451.500,00
		5. Truni	28.131.800,00
		6. Gendongkulon	54.826.100,00
		7. Plaosan	45.193.200,00
		8. Trepan	81.922.300,00
		9. Kuripan	37.195.100,00
		10. Kebalanpelang	39.222.900,00
		11. Sumurgenuk	34.885.600,00
		12. Gembong	52.585.700,00
		13. Bulumargi	45.246.000,00
		14. Datinawong	36.491.100,00
		15. Kebalandono	38.661.000,00
		16. Patihan	32.381.400,00
		17. Moropelang	37.618.900,00
		18. Keyongan	33.790.600,00
		19. Sambangan	31.291.000,00
		20. Tritunggal	37.108.800,00
		21. Kebonagung	29.702.600,00
6.	Kedungpring	1. Dradahblumbang	89.337.400,00
		2. Kalen	51.742.400,00
		3. Mojodadi	33.724.700,00
		4. Gunungrejo	35.419.500,00
		5. Warungering	33.482.700,00
		6. Jatidrojok	31.583.500,00
		7. Kradenanrejo	33.548.400,00
		8. Kandangrejo	37.168.300,00
		9. Kedungpring	49.794.800,00

1.	2	3	4
		10. Tlanak	40.647.200,00
		11. Sukomalo	34.108.300,00
		12. Mlati	30.891.900,00
		13. Karangcangkring	26.867.400,00
		14. Mekanderejo	37.732.100,00
		15. Banjarejo	36.452.800,00
		16. Sidobangun	23.950.300,00
		17. Blawirejo	32.741.000,00
		18. Maindu	31.926.500,00
		19. Tenggerejo	32.683.300,00
		20. Majenang	36.569.800,00
		21. Sidomlangen	36.891.800,00
		22. Nglebur	34.765.700,00
		23. Sumengko	29.481.600,00
7.	Brondong	1. Lohgung	39.166.300,00
		2. Labuhan	53.752.000,00
		3. Sidomukti	47.188.500,00
		4. Brengkok	76.787.700,00
		5. Tlogoretno	130.168.700,00
		6. Sendangharjo	41.518.100,00
		7. Lembor	35.164.900,00
		8. Sedayulawas	133.104.000,00
		9. Sumberagung	30.941.600,00
8.	Laren	1. Dateng	28.700.700,00
		2. Jabung	33.711.800,00
		3. Keduyung	27.693.500,00
		4. Centini	31.740.300,00
		5. Durikulon	27.938.500,00
		6. Pesanggrahan	25.603.100,00
		7. Gelap	37.580.800,00
		8. Mojoasem	25.850.500,00
		9. Siser	27.823.500,00
		10. Bulutigo	33.014.300,00
		11. Pelangwot	36.846.400,00
		12. Laren	29.591.300,00
		13. Gampangsejati	31.890.400,00
		14. Tamanprijek	31.431.200,00
		15. Karangtawar	32.386.200,00
		16. Tejoasri	34.184.700,00
		17. Godog	30.403.900,00
		18. Bulubransi	34.230.300,00
		19. Karangwungulor	25.059.200,00
		20. Brangsi	32.587.800,00
9.	Sekaran	1. Besur	29.635.800,00
		2. Titik	26.360.100,00
		3. Kendal	28.087.200,00
		4. Keting	25.888.800,00
		5. Ngarum	30.015.700,00
		6. Kebalankulon	29.511.800,00

1.	2	3	4
		7. Kudikan	27.641.900,00
		8. Jugo	38.313.400,00
		9. Manyar	33.992.200,00
		10. Trosono	30.371.800,00
		11. Latek	30.404.000,00
		12. Miru	29.789.600,00
		13. Sekaran	47.583.900,00
		14. Moro	27.158.600,00
		15. Karang	29.857.300,00
		16. Kembangan	28.385.100,00
		17. Siman	32.492.100,00
		18. Bulutengger	34.451.400,00
		19. Porodeso	26.770.400,00
		20. Bugel	24.661.300,00
		21. Sungegeneng	46.307.700,00
10.	Maduran	1. Duriwetan	32.731.600,00
		2. Taji	28.393.500,00
		3. Brumbun	34.498.100,00
		4. Siwuran	29.251.000,00
		5. Klangensrampat	29.896.200,00
		6. Pangean	34.953.400,00
		7. Maduran	29.693.700,00
		8. Jangkungsono	25.394.300,00
		9. Parengan	26.140.800,00
		10. Pangkatrejo	24.428.200,00
		11. Kanugrahan	33.199.200,00
		12. Gumantuk	32.039.700,00
		13. Ngayung	36.066.200,00
		14. Pringgoboyo	27.959.900,00
		15. Gedangan	29.737.400,00
		16. Turi	29.819.000,00
		17. Blumbang	26.355.600,00
11.	Sambeng	1. Sidokumpul	40.567.600,00
		2. Pasarlegi	35.498.200,00
		3. Semampirejo	31.549.900,00
		4. Wateswinangun	37.193.700,00
		5. Summersari	28.969.500,00
		6. Pataan	31.888.700,00
		7. Tenggiring	29.416.900,00
		8. Garung	28.787.500,00
		9. Wonorejo	27.757.800,00
		10. Ardirejo	34.996.300,00
		11. Sekidang	23.369.900,00
		12. Kedungwangi	33.361.400,00
		13. Jatipandak	27.639.900,00
		14. Candisari	35.320.400,00
		15. Nogojatisari	30.068.800,00
		16. Pamotan	33.902.900,00
		17. Wudi	29.285.600,00

1.	2	3	4
		18. Barurejo	27.862.800,00
		19. Kedungbanjar	24.321.200,00
		20. Gempolmanis	30.918.700,00
		21. Selorejo	28.907.700,00
		22. Kreteranggon	32.878.100,00
12.	Sugio	1. Sidobogem	26.872.000,00
		2. Kalitengah	26.522.500,00
		3. Kedungdadi	41.023.300,00
		4. Sidorejo	39.590.600,00
		5. Kedungbanjar	32.168.700,00
		6. Bedingin	42.247.500,00
		7. Bakalanrejo	38.654.700,00
		8. Gondanglor	39.978.100,00
		9. Pangkatrejo	35.818.200,00
		10. Karangsambigalih	37.035.300,00
		11. Supenuh	32.466.900,00
		12. Lebakadi	43.893.600,00
		13. Deketagung	36.170.900,00
		14. Jubellor	33.766.000,00
		15. Sugio	54.579.300,00
		16. Daliwangun	28.932.900,00
		17. Jubelkidul	42.312.800,00
		18. Lawanganagung	37.821.600,00
		19. Kalipang	34.396.700,00
		20. German	38.608.200,00
		21. Sekarbagus	44.734.700,00
13.	Pucuk	1. Pucuk	49.405.400,00
		2. Gempolpadding	37.163.000,00
		3. Kesambi	28.994.600,00
		4. Plososetro	26.642.400,00
		5. Wanar	44.738.800,00
		6. Karangtinggil	43.528.200,00
		7. Warukulon	51.613.500,00
		8. Waruwetan	30.023.700,00
		9. Kedali	27.884.500,00
		10. Paji	65.833.400,00
		11. Sumberejo	33.076.300,00
		12. Cungkup	34.623.700,00
		13. Bogoharjo	31.591.100,00
		14. Ngambeg	35.459.400,00
		15. Babatkumpul	29.300.400,00
		16. Tanggungan	35.623.700,00
		17. Padenganploso	37.674.300,00
14.	Paciran	1. Kandangsemangkon	71.440.900,00
		2. Paciran	123.220.100,00
		3. Sumurgayam	43.112.200,00
		4. Sendangagung	50.109.500,00
		5. Sendangduwur	25.172.500,00
		6. Tunggul	44.363.700,00

1.	2	3	4
		7. Kranji	46.637.500,00
		8. Drajat	29.529.000,00
		9. Banjarwati	49.594.900,00
		10. Kemantren	121.003.300,00
		11. Sidokelar	121.628.000,00
		12. Tlogosadang	45.429.000,00
		13. Paloh	24.494.500,00
		14. Weru	32.277.600,00
		15. Sidokumpul	25.740.800,00
		16. Warulor	24.109.700,00
15.	Solokuro	1. Dadapan	67.370.700,00
		2. Tebluru	39.027.500,00
		3. Sugihan	43.954.100,00
		4. Tenggulun	40.840.300,00
		5. Payaman	72.096.100,00
		6. Solokuro	45.196.600,00
		7. Takerharjo	67.027.800,00
		8. Dagan	48.953.100,00
		9. Banyubang	35.277.300,00
		10. Bluri	38.832.000,00
16.	Mantup	1. Sukobendu	45.429.300,00
		2. Tunggunjagir	46.537.100,00
		3. Sumberbendo	31.522.200,00
		4. Mantup	59.619.900,00
		5. Kedungbembem	29.579.000,00
		6. Sumberdadi	38.937.800,00
		7. Kedungsoko	44.321.800,00
		8. Tugu	30.479.900,00
		9. Sokosari	33.231.800,00
		10. Sumberagung	30.116.300,00
		11. Sidomulyo	30.685.100,00
		12. Mojosari	32.615.900,00
		13. Pelabuhanrejo	32.815.900,00
		14. Sumberkerep	37.759.600,00
		15. Rumpuk	29.267.900,00
17.	Sukodadi	1. Siwalanrejo	27.438.000,00
		2. Kebonsari	34.781.400,00
		3. Sukolilo	41.278.800,00
		4. Pajangan	27.905.200,00
		5. Kadungrembug	33.526.700,00
		6. Sumberagung	32.984.400,00
		7. Sukodadi	55.908.300,00
		8. Sumberaji	33.956.700,00
		9. Menongo	35.628.000,00
		10. Madulegi	33.234.100,00
		11. Banjarejo	35.931.000,00
		12. Plumpang	32.654.500,00
		13. Bandungsari	29.861.500,00
		14. Sidogembul	37.025.000,00

1.	2	3	4
		15. Balongtawun	36.643.900,00
		16. Gedangan	33.039.400,00
		17. Tlogorejo	30.339.700,00
		18. Baturono	33.401.100,00
		19. Surabayan	32.013.200,00
		20. Sugihrejo	29.677.400,00
18.	Karanggeneng	1. Bantengputih	28.753.900,00
		2. Karangrejo	26.747.300,00
		3. Latukan	37.457.500,00
		4. Guci	28.520.300,00
		5. Kaligerman	26.270.700,00
		6. Sungelebak	32.097.100,00
		7. Prijekngablak	29.046.200,00
		8. Tracal	26.932.600,00
		9. Sonoadi	28.194.300,00
		10. Kalanganyar	28.873.400,00
		11. Banjarmasin	40.054.700,00
		12. Kendalkemlagi	37.241.300,00
		13. Kawistolegi	33.167.300,00
		14. Jagran	28.166.400,00
		15. Karangwungu	27.670.400,00
		16. Sumberwudi	32.823.700,00
		17. Karanggeneng	29.190.400,00
		18. Mertani	34.925.300,00
19.	Kembangbahu	1. Tlogoagung	35.887.100,00
		2. Kedungmegarih	32.950.400,00
		3. Sidomukti	30.597.800,00
		4. Sukosongo	32.407.300,00
		5. Kaliwates	31.295.600,00
		6. Kedungasri	28.476.400,00
		7. Doyomulyo	35.545.600,00
		8. Kembangbahu	36.756.900,00
		9. Maor	28.216.200,00
		10. Moronyamplung	61.394.200,00
		11. Mangkujajar	27.678.400,00
		12. Puter	45.426.600,00
		13. Pelang	55.211.200,00
		14. Dumpiagung	39.651.000,00
		15. Randubener	29.974.000,00
		16. Lopang	65.177.200,00
		17. Gintungan	32.293.300,00
		18. Katemas	34.504.800,00
20.	Kalitengah	1. Pucangro	32.950.800,00
		2. Pucangtelu	30.043.500,00
		3. Somosari	29.386.000,00
		4. Jelakcatur	28.684.700,00
		5. Mungli	28.852.700,00
		6. Pegangsalan	26.343.400,00
		7. Dibe	28.653.200,00

1.	2	3	4
		8. Butungan	26.209.500,00
		9. Lukrejo	34.210.800,00
		10. Tiwet	25.044.700,00
		11. Blajo	25.406.800,00
		12. Kalitengah	26.834.100,00
		13. Gambuhan	24.586.600,00
		14. Cluring	25.654.500,00
		15. Bojoasri	31.480.300,00
		16. Kediren	27.428.400,00
		17. Kuluran	30.561.800,00
		18. Canditunggal	27.270.000,00
		19. Sugihwaras	31.613.800,00
		20. Tunjungmekar	26.863.500,00
21.	Turi	1. Geger	34.808.200,00
		2. Badurame	30.538.400,00
		3. Karangwedoro	34.255.100,00
		4. Wangunrejo	27.886.800,00
		5. Putatkumpul	34.949.600,00
		6. Keben	30.904.100,00
		7. Sukoanyar	32.899.800,00
		8. Kemlagigede	34.920.800,00
		9. Turi	31.138.400,00
		10. Kemlagilor	29.100.100,00
		11. Sukorejo	28.101.700,00
		12. Tawangrejo	34.703.300,00
		13. Bambang	26.954.500,00
		14. Pomahanjangan	28.021.100,00
		15. Tambakploso	31.338.500,00
		16. Balun	49.384.800,00
		17. Ngujungrejo	27.337.000,00
		18. Kepundibener	33.878.700,00
		19. Gedongboyountung	37.153.900,00
22.	Lamongan	1. Rancangkencono	34.430.600,00
		2. Karanglangit	41.495.500,00
		3. Pangkatrejo	37.195.500,00
		4. Kebet	33.346.900,00
		5. Sendangrejo	34.928.800,00
		6. Sumberejo	45.306.100,00
		7. Tanjung	51.862.100,00
		8. Plosowahyu	85.018.900,00
		9. Wajik	39.674.100,00
		10. Kramat	36.076.300,00
		11. Made	85.229.300,00
		12. Sidomukti	40.621.600,00
23.	Tikung	1. Wonokromo	45.672.900,00
		2. Soko	46.150.500,00
		3. Gumingrejo	34.913.200,00
		4. Bakalanpule	43.951.300,00
		5. Takeraklating	56.390.100,00

1.	2	3	4
		6. Kelorarum	32.362.500,00
		7. Jotosanur	39.363.600,00
		8. Pengumbulanadi	40.655.400,00
		9. Jatirejo	43.662.500,00
		10. Dukuhagung	45.156.300,00
		11. Tambakrigadung	62.360.100,00
		12. Botoputih	30.040.300,00
		13. Balongwangi	41.026.600,00
24.	Karangbinangun	1. Waruk	27.558.500,00
		2. Sukorejo	37.167.100,00
		3. Karanganom	30.130.200,00
		4. Somowinangun	31.213.100,00
		5. Ketapangtelu	35.681.000,00
		6. Mayong	37.212.400,00
		7. Palangan	34.818.700,00
		8. Blawi	40.858.900,00
		9. Banjarejo	34.592.700,00
		10. Putatbangah	31.880.100,00
		11. Banyuurip	26.754.200,00
		12. Pendowolimo	35.433.700,00
		13. Baranggayam	26.528.600,00
		14. Watangpanjang	28.129.800,00
		15. Sambopinggir	32.319.500,00
		16. Priyoso	26.703.800,00
		17. Windu	30.657.400,00
		18. Bogobabadan	29.914.800,00
		19. Gawerejo	29.398.000,00
		20. Kuro	29.502.100,00
		21. Karangbinangun	28.007.800,00
25.	Deket	1. Sidorejo	29.938.500,00
		2. Dlanggu	39.497.000,00
		3. Laladan	31.765.900,00
		4. Deketkulon	51.661.900,00
		5. Deketwetan	40.367.500,00
		6. Sugihwaras	32.528.100,00
		7. Dinoyo	35.172.900,00
		8. Sidomulyo	30.829.900,00
		9. Rejosari	204.221.400,00
		10. Pandanpancur	61.562.700,00
		11. Sidobinangun	32.194.900,00
		12. Babatagung	33.430.400,00
		13. Tukerto	34.961.800,00
		14. Weduni	29.005.200,00
		15. Rejotengah	32.091.900,00
		16. Srirande	34.383.100,00
		17. Plosoboden	32.178.300,00
26.	Glagah	1. Soko	29.844.200,00
		2. Morocalon	25.941.500,00
		3. Gempolpendowo	26.927.300,00

1.	2	3	4		
		4. Pasi	28.890.500,00		
		5. Rayunggumuk	31.076.200,00		
		6. Menganti	30.784.500,00		
		7. Margoanyar	30.167.900,00		
		8. Began	24.203.600,00		
		9. Mendogo	26.661.100,00		
		10. Kentong	28.493.300,00		
		11. Sudangan	26.955.700,00		
		12. Medang	26.909.300,00		
		13. Duduklor	27.788.600,00		
		14. Glagah	33.150.100,00		
		15. Wangen	27.945.800,00		
		16. Tanggunprigel	28.535.700,00		
		17. Karangagung	28.472.600,00		
		18. Bangkok	26.806.300,00		
		19. Jatirenggo	29.172.300,00		
		20. Bapuhbaru	27.503.900,00		
		21. Bapuhbandung	27.953.600,00		
		22. Meluntur	26.154.400,00		
		23. Konang	24.709.300,00		
		24. Dukuhtunggal	32.850.500,00		
		25. Panggang	26.312.400,00		
		26. Wonorejo	25.964.800,00		
		27. Wedoro	25.402.100,00		
		28. Karangturi	28.257.900,00		
		29. Meluwur	26.054.800,00		
		27.	Sarirejo	1. Kedungkumpul	35.703.900,00
				2. Dermolemahbang	58.825.200,00
				3. Simbatan	36.784.700,00
4. Sumberejo	35.488.800,00				
5. Canggih	28.449.000,00				
6. Beru	33.093.100,00				
7. Tambakmenjangan	54.673.900,00				
8. Gempoltukmloko	36.952.000,00				
9. Sarirejo	36.913.900,00				
	TOTAL		16.909.875.600,00		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2024

ALOKASI BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI (Rp)
1.	2	3	4
1.	Sukorame	1. Sembung	3.793.100,00
		2. Bangle	4.133.700,00
		3. Kedungkumpul	6.171.700,00
		4. Sukorame	6.614.300,00
		5. Mragel	4.090.700,00
		6. Kedungrejo	3.696.200,00
		7. Sewor	4.449.400,00
		8. Wedoro	4.391.100,00
		9. Pendowokumpul	4.536.500,00
2.	Bluluk	1. Talunrejo	4.583.900,00
		2. Banjargondang	4.283.400,00
		3. Bluluk	5.580.600,00
		4. Cangkring	4.532.600,00
		5. Bronjong	4.393.600,00
		6. Songowareng	5.258.600,00
		7. Kuwurejo	4.995.900,00
		8. Sumberbanjar	5.238.600,00
		9. Primpen	4.429.300,00
3.	Modo	1. Jegreg	6.044.600,00
		2. Kedungpengaron	4.623.600,00
		3. Sumberagung	5.067.200,00
		4. Kedunglerep	4.257.800,00
		5. Jatipayak	4.963.100,00
		6. Kedungwaras	4.762.600,00
		7. Sidomulyo	4.609.300,00
		8. Sambangrejo	3.856.400,00
		9. Medalem	4.085.800,00
		10. Sidodowo	5.833.500,00
		11. Mojorejo	6.575.000,00
		12. Sambongrejo	3.964.800,00
		13. Kedungrejo	4.810.900,00
		14. Kacangan	5.516.700,00
		15. Nguwok	7.614.000,00
		16. Pule	5.425.400,00
		17. Yungyang	4.839.900,00

1.	2	3	4
4.	Ngimbang	1. Kedungmentawar	4.020.900,00
		2. Cerme	3.951.500,00
		3. Gebangangkrik	4.222.900,00
		4. Ngasemlemahbang	4.204.900,00
		5. Slaharwotan	5.815.800,00
		6. Ganggangtingan	4.539.900,00
		7. Jejel	4.070.500,00
		8. Purwokerto	4.544.300,00
		9. Kakatpenjalin	4.695.700,00
		10. Tlemang	3.823.800,00
		11. Mendogo	4.646.800,00
		12. Lawak	5.720.100,00
		13. Drujugurit	3.792.800,00
		14. Girik	4.305.600,00
		15. Munungrejo	5.408.600,00
		16. Ngimbang	3.948.600,00
		17. Durikedungjero	4.253.000,00
		18. Lamongrejo	14.533.700,00
		19. Sendangrejo	6.569.100,00
5.	Babat	1. Karangkembang	5.290.100,00
		2. Pucakwangi	4.367.700,00
		3. Sogo	4.066.500,00
		4. Bedahan	4.913.200,00
		5. Truni	3.898.700,00
		6. Gendongkulon	7.598.300,00
		7. Plaosan	6.263.300,00
		8. Trepan	11.353.600,00
		9. Kuripan	5.154.800,00
		10. Kebalanpelang	5.435.900,00
		11. Sumurgenuk	4.834.700,00
		12. Gembong	7.287.800,00
		13. Bulumargi	6.270.600,00
		14. Datinawong	5.057.300,00
		15. Kebalandono	5.358.000,00
		16. Patihan	4.487.700,00
		17. Moropelang	5.213.600,00
		18. Keyongan	4.683.000,00
		19. Sambangan	4.336.600,00
		20. Tritunggal	5.142.900,00
		21. Kebonagung	4.116.400,00
6.	Kedungpring	1. Dradahblumbang	12.381.200,00
		2. Kalen	7.170.900,00
		3. Mojodadi	4.673.900,00
		4. Gunungrejo	4.908.700,00
		5. Warungering	4.640.300,00
		6. Jatidrojek	4.377.100,00
		7. Kradenanrejo	4.649.400,00
		8. Kandangrejo	5.151.100,00
		9. Kedungpring	6.901.000,00

1.	2	3	4
		10. Tlanak	5.633.200,00
		11. Sukomalo	4.727.000,00
		12. Mlati	4.281.300,00
		13. Karangcangkring	3.723.500,00
		14. Mekanderejo	5.229.300,00
		15. Banjarejo	5.052.000,00
		16. Sidobangun	3.319.200,00
		17. Blawirejo	4.537.500,00
		18. Maindu	4.424.700,00
		19. Tenggerejo	4.529.500,00
		20. Majenang	5.068.200,00
		21. Sidomlangen	5.112.800,00
		22. Nglebur	4.818.100,00
		23. Sumengko	4.085.800,00
7.	Brondong	1. Lohgung	5.428.000,00
		2. Labuhan	7.449.400,00
		3. Sidomukti	6.539.800,00
		4. Brengkok	10.642.000,00
		5. Tlogoretno	18.040.000,00
		6. Sendangharjo	5.753.900,00
		7. Lembor	4.873.500,00
		8. Sedayulawas	18.446.800,00
		9. Sumberagung	4.288.200,00
8.	Laren	1. Dateng	3.977.600,00
		2. Jabung	4.672.100,00
		3. Keduyung	3.838.000,00
		4. Centini	4.398.800,00
		5. Durikulon	3.871.900,00
		6. Pesanggrahan	3.548.300,00
		7. Gelap	5.208.300,00
		8. Mojoasem	3.582.600,00
		9. Siser	3.856.000,00
		10. Bulutigo	4.575.400,00
		11. Pelangwot	5.106.500,00
		12. Laren	4.101.000,00
		13. Gampangsejati	4.419.600,00
		14. Tamanprijek	4.356.000,00
		15. Karangtawar	4.488.400,00
		16. Tejoasri	4.737.600,00
		17. Godog	4.213.600,00
		18. Bulubrangsi	4.743.900,00
		19. Karangwungulor	3.472.900,00
		20. Brangsi	4.516.300,00
9.	Sekaran	1. Besur	4.107.200,00
		2. Titik	3.653.200,00
		3. Kendal	3.892.600,00
		4. Keting	3.587.900,00
		5. Ngarum	4.159.800,00
		6. Kebalankulon	4.090.000,00

1.	2	3	4
		7. Kudikan	3.830.800,00
		8. Jugo	5.309.800,00
		9. Manyar	4.710.900,00
		10. Trosono	4.209.200,00
		11. Latek	4.213.700,00
		12. Miru	4.128.500,00
		13. Sekaran	6.594.600,00
		14. Moro	3.763.900,00
		15. Karang	4.137.900,00
		16. Kembangan	3.933.800,00
		17. Siman	4.503.000,00
		18. Bulutengger	4.774.600,00
		19. Porodeso	3.710.100,00
		20. Bugel	3.417.800,00
		21. Sungegeneng	6.417.700,00
10.	Maduran	1. Duriwetan	4.536.200,00
		2. Taji	3.935.000,00
		3. Brumbun	4.781.000,00
		4. Siwuran	4.053.900,00
		5. Klangensrampat	4.143.300,00
		6. Pangean	4.844.100,00
		7. Maduran	4.115.200,00
		8. Jangkungsono	3.519.300,00
		9. Parengan	3.622.800,00
		10. Pangkatrejo	3.385.500,00
		11. Kanugrahan	4.601.000,00
		12. Gumantuk	4.440.300,00
		13. Ngayung	4.998.400,00
		14. Pringgoboyo	3.874.900,00
		15. Gedangan	4.121.300,00
		16. Turi	4.132.600,00
		17. Blumbang	3.652.600,00
11.	Sambeng	1. Sidokumpul	5.622.200,00
		2. Pasarlegi	4.919.600,00
		3. Semampirejo	4.372.500,00
		4. Wateswinangun	5.154.600,00
		5. Sumbersari	4.014.800,00
		6. Pataan	4.419.400,00
		7. Tenggiring	4.076.800,00
		8. Garung	3.989.600,00
		9. Wonorejo	3.846.900,00
		10. Ardirejo	4.850.100,00
		11. Sekidang	3.259.200,00
		12. Kedungwangi	4.623.500,00
		13. Jatipandak	3.830.600,00
		14. Candisari	4.895.000,00
		15. Nogojatisari	4.167.200,00
		16. Pamotan	4.698.600,00
		17. Wudi	4.058.600,00

1.	2	3	4
		18. Barurejo	3.861.500,00
		19. Kedungbanjar	3.370.600,00
		20. Gempolmanis	4.285.000,00
		21. Selorejo	4.006.300,00
		22. Kreteranggon	4.556.500,00
12.	Sugio	1. Sidobogem	3.724.100,00
		2. Kalitengah	3.675.700,00
		3. Kedungdadi	5.685.400,00
		4. Sidorejo	5.486.800,00
		5. Kedungbanjar	4.458.200,00
		6. Bedingin	5.855.000,00
		7. Bakalanrejo	5.357.100,00
		8. Gondanglor	5.540.500,00
		9. Pangkatrejo	4.964.000,00
		10. Karangsembigalih	5.132.700,00
		11. Supenuh	4.499.500,00
		12. Lebakadi	6.083.200,00
		13. Deketagung	5.012.900,00
		14. Jubellor	4.679.600,00
		15. Sugio	7.564.100,00
		16. Daliwangun	4.009.800,00
		17. Jubelkidul	5.864.100,00
		18. Lawanganagung	5.241.700,00
		19. Kalipang	4.767.000,00
		20. German	5.350.700,00
		21. Sekarbagus	6.199.700,00
13.	Pucuk	1. Pucuk	6.847.100,00
		2. Gempolpading	5.150.400,00
		3. Kesambi	4.018.300,00
		4. Plososetro	3.692.300,00
		5. Wanar	6.200.300,00
		6. Karangtinggil	6.032.500,00
		7. Warukulon	7.153.100,00
		8. Waruwetan	4.160.900,00
		9. Kedali	3.864.500,00
		10. Paji	9.123.800,00
		11. Sumberejo	4.584.000,00
		12. Cungkup	4.798.500,00
		13. Bogoharjo	4.378.200,00
		14. Ngambeg	4.914.300,00
		15. Babatkumpul	4.060.700,00
		16. Tanggungan	4.937.000,00
		17. Padenganploso	5.221.200,00
14.	Paciran	1. Kandangsemangkon	9.901.000,00
		2. Paciran	17.077.000,00
		3. Sumurgayam	5.974.900,00
		4. Sendangagung	6.944.600,00
		5. Sendangduwur	3.488.600,00
		6. Tunggul	6.148.300,00

1.	2	3	4
		7. Kranji	6.463.400,00
		8. Drajat	4.092.400,00
		9. Banjarwati	6.873.300,00
		10. Kemantren	16.769.800,00
		11. Sidokelar	16.856.400,00
		12. Tlogosadang	6.296.000,00
		13. Paloh	3.394.600,00
		14. Weru	4.473.300,00
		15. Sidokumpul	3.567.400,00
		16. Warulor	3.341.300,00
15.	Solokuro	1. Dadapan	9.336.900,00
		2. Tebluru	5.408.800,00
		3. Sugihan	6.091.600,00
		4. Tenggulun	5.660.000,00
		5. Payaman	9.991.800,00
		6. Solokuro	6.263.700,00
		7. Takerharjo	9.289.300,00
		8. Dagan	6.784.400,00
		9. Banyubang	4.889.000,00
		10. Bluri	5.381.700,00
16.	Mantup	1. Sukobendu	6.296.000,00
		2. Tunggunjagir	6.449.500,00
		3. Sumberbendo	4.368.600,00
		4. Mantup	8.262.700,00
		5. Kedungbembem	4.099.300,00
		6. Sumberdadi	5.396.300,00
		7. Kedungsoko	6.142.500,00
		8. Tugu	4.224.200,00
		9. Sokosari	4.605.500,00
		10. Sumberagung	4.173.800,00
		11. Sidomulyo	4.252.600,00
		12. Mojosari	4.520.200,00
		13. Pelabuhanrejo	4.547.900,00
		14. Sumberkerep	5.233.100,00
		15. Rumpuk	4.056.200,00
17.	Sukodadi	1. Siwalanrejo	3.802.600,00
		2. Kebonsari	4.820.300,00
		3. Sukolilo	5.720.800,00
		4. Pajangan	3.867.300,00
		5. Kadungrembug	4.646.400,00
		6. Sumberagung	4.571.300,00
		7. Sukodadi	7.748.300,00
		8. Sumberaji	4.706.000,00
		9. Menongo	4.937.600,00
		10. Madulegi	4.605.900,00
		11. Banjarejo	4.979.600,00
		12. Plumpang	4.525.500,00
		13. Bandungsari	4.138.500,00
		14. Sidogembul	5.131.200,00

1.	2	3	4
		15. Balongtawun	5.078.400,00
		16. Gedangan	4.578.900,00
		17. Tlogorejo	4.204.700,00
		18. Baturono	4.629.000,00
		19. Surabayan	4.436.700,00
		20. Sugihrejo	4.112.900,00
18.	Karanggeneng	1. Bantengputih	3.985.000,00
		2. Karangrejo	3.706.900,00
		3. Latukan	5.191.200,00
		4. Guci	3.952.600,00
		5. Kaligerman	3.640.800,00
		6. Sungelebak	4.448.300,00
		7. Prijekngablak	4.025.500,00
		8. Tracal	3.732.500,00
		9. Sonoadi	3.907.400,00
		10. Kalanganyar	4.001.500,00
		11. Banjarmasin	5.551.100,00
		12. Kendalkemlagi	5.161.200,00
		13. Kawistolegi	4.596.600,00
		14. Jagran	3.903.500,00
		15. Karangwungu	3.834.800,00
		16. Sumberwudi	4.549.000,00
		17. Karanggeneng	4.045.500,00
		18. Mertani	4.840.300,00
19.	Kembangbahu	1. Tlogoagung	4.973.500,00
		2. Kedungmegarih	4.566.600,00
		3. Sidomukti	4.240.500,00
		4. Sukosongo	4.491.300,00
		5. Kaliwates	4.337.200,00
		6. Kedungasri	3.946.500,00
		7. Doyomulyo	4.926.200,00
		8. Kembangbahu	5.094.100,00
		9. Maor	3.910.400,00
		10. Moronyamplung	8.508.600,00
		11. Mangkujajar	3.835.900,00
		12. Puter	6.295.600,00
		13. Pelang	7.651.700,00
		14. Dumpiagung	5.495.200,00
		15. Randubener	4.154.000,00
		16. Lopang	9.032.900,00
		17. Gintungan	4.475.500,00
		18. Katemas	4.782.000,00
20.	Kalitengah	1. Pucangro	4.566.600,00
		2. Pucangtelu	4.163.700,00
		3. Somosari	4.072.600,00
		4. Jelakcatur	3.975.400,00
		5. Mungli	3.998.700,00
		6. Pegangsalan	3.650.900,00
		7. Dibe	3.971.000,00

1.	2	3	4
		8. Butungan	3.632.300,00
		9. Lukrejo	4.741.200,00
		10. Tiwet	3.470.900,00
		11. Blajo	3.521.100,00
		12. Kalitengah	3.718.900,00
		13. Gambuhan	3.407.400,00
		14. Cluring	3.555.400,00
		15. Bojoasri	4.362.800,00
		16. Kediren	3.801.300,00
		17. Kuluran	4.235.500,00
		18. Canditunggal	3.779.300,00
		19. Sugihwaras	4.381.300,00
		20. Tunjungmekar	3.723.000,00
21.	Turi	1. Geger	4.824.000,00
		2. Badurame	4.232.300,00
		3. Karangwedoro	4.747.400,00
		4. Wangunrejo	3.864.800,00
		5. Putatkumpul	4.843.600,00
		6. Keben	4.283.000,00
		7. Sukoanyar	4.559.500,00
		8. Kemlagigede	4.839.600,00
		9. Turi	4.315.400,00
		10. Kemlagilor	4.032.900,00
		11. Sukorejo	3.894.600,00
		12. Tawangrejo	4.809.500,00
		13. Bambang	3.735.600,00
		14. Pomahanjangan	3.883.400,00
		15. Tambakploso	4.343.200,00
		16. Balun	6.844.200,00
		17. Ngujungrejo	3.788.600,00
		18. Kepundibener	4.695.200,00
		19. Gedongboyountung	5.149.100,00
22.	Lamongan	1. Rancangkencono	4.771.700,00
		2. Karanglangit	5.750.800,00
		3. Pangkatrejo	5.154.900,00
		4. Kebet	4.621.500,00
		5. Sendangrejo	4.840.700,00
		6. Sumberejo	6.278.900,00
		7. Tanjung	7.187.500,00
		8. Plosowahyu	11.782.700,00
		9. Wajik	5.498.400,00
		10. Kramat	4.999.800,00
		11. Made	11.811.900,00
		12. Sidomukti	5.629.700,00
23.	Tikung	1. Wonokromo	6.329.800,00
		2. Soko	6.396.000,00
		3. Guminingrejo	4.838.600,00
		4. Bakalanpule	6.091.200,00
		5. Takeraklantung	7.815.100,00

1.	2	3	4
		6. Kelorarum	4.485.100,00
		7. Jotosanur	5.455.400,00
		8. Pengumbulanadi	5.634.400,00
		9. Jatirejo	6.051.100,00
		10. Dukuhagung	6.258.200,00
		11. Tambakrigadung	8.642.400,00
		12. Botoputih	4.163.200,00
		13. Balongwangi	5.685.800,00
24.	Karangbinangun	1. Waruk	3.819.300,00
		2. Sukorejo	5.150.900,00
		3. Karanganom	4.175.700,00
		4. Somowinangun	4.325.800,00
		5. Ketapangtelu	4.945.000,00
		6. Mayong	5.157.200,00
		7. Palangan	4.825.500,00
		8. Blawi	5.662.600,00
		9. Banjarejo	4.794.200,00
		10. Putatbangah	4.418.200,00
		11. Banyuurip	3.707.800,00
		12. Pendowolimo	4.910.700,00
		13. Baranggayam	3.676.500,00
		14. Watangpanjang	3.898.500,00
		15. Sambopinggir	4.479.100,00
		16. Priyoso	3.700.800,00
		17. Windu	4.248.800,00
		18. Bogobabadan	4.145.800,00
		19. Gawerejo	4.074.200,00
		20. Kuro	4.088.600,00
		21. Karangbinangun	3.881.600,00
25.	Deket	1. Sidorejo	4.149.100,00
		2. Dlanggu	5.473.800,00
		3. Laladan	4.402.400,00
		4. Deketkulon	7.159.800,00
		5. Deketwetan	5.594.500,00
		6. Sugihwaras	4.508.000,00
		7. Dinoyo	4.874.600,00
		8. Sidomulyo	4.272.700,00
		9. Rejosari	28.303.000,00
		10. Pandanpancur	8.531.900,00
		11. Sidobinangun	4.461.800,00
		12. Babatagung	4.633.100,00
		13. Tukerto	4.845.300,00
		14. Weduni	4.019.800,00
		15. Rejotengah	4.447.600,00
		16. Srirande	4.765.100,00
		17. Plosoboden	4.459.500,00
26.	Glagah	1. Soko	4.136.100,00
		2. Morocalon	3.595.200,00
		3. Gempolpendowo	3.731.800,00

1.	2	3	4
		4. Pasi	4.003.900,00
		5. Rayunggumuk	4.306.800,00
		6. Menganti	4.266.400,00
		7. Margoanyar	4.180.900,00
		8. Began	3.354.300,00
		9. Mendogo	3.694.900,00
		10. Kentong	3.948.800,00
		11. Sudangan	3.735.700,00
		12. Medang	3.729.300,00
		13. Duduklor	3.851.200,00
		14. Glagah	4.594.200,00
		15. Wangen	3.873.000,00
		16. Tanggungprigel	3.954.700,00
		17. Karangagung	3.946.000,00
		18. Bangkok	3.715.000,00
		19. Jatirenggo	4.042.900,00
		20. Bapuhbaru	3.811.700,00
		21. Bapuhbandung	3.874.100,00
		22. Meluntur	3.624.700,00
		23. Konang	3.424.400,00
		24. Dukuhtunggal	4.552.700,00
		25. Panggang	3.646.600,00
		26. Wonorejo	3.598.400,00
		27. Wedoro	3.520.400,00
		28. Karangturi	3.916.200,00
		29. Meluwur	3.610.900,00
27.	Sarirejo	1. Kedungkumpul	4.948.200,00
		2. Dermolemahbang	8.152.500,00
		3. Simbatan	5.097.900,00
		4. Sumberejo	4.918.300,00
		5. Canggih	3.942.700,00
		6. Beru	4.586.300,00
		7. Tambakmenjangan	7.577.200,00
		8. Gempoltukmloko	5.121.100,00
		9. Sarirejo	5.115.800,00
		TOTAL	2.343.538.700,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI